

TEMU MITRA DIV HUMAS POLRI DENGAN KPI DAN TV INDOSIAR

Oleh : Drs. Runadi Ma'mun



Kadiv humas Polri dalam pertemuan silaturahmi dengan KPI

Temu mitra dengan KPI

Kadiv Humas Polri beserta staf Divhumas Polri pada tanggal 28 April 2008 telah mengadakan kunjungan kerja dalam rangka menjalin kerjasama dan silaturahmi, dan telah diterima oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D didampingi staf dari KPI. Kedatangan rombongan Divhumas Polri ke KPI telah diterima dengan baik dan terjalin silaturahmi, dengan cara tukar menukar informasi dan beberapa harapan masing-masing rombongan, beberapa hal yang disampaikan oleh pejabat Kadiv Humas Polri IrjenPol. Drs. Abubakar Nata Prawira, SH sebagai pejabat baru antara lain; pengalaman kerja selama menjadi anggota Polri, baik dalam suka maupun duka serta keberhasilan melaksanakan tugas, baik dalam tugas dikepolisian maupun tugas di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Beberapa pemberitaan melalui media elektronik dan media cetak oleh Kadiv Humas Polri diangkat dalam upaya saling

pengertian dan tukar informasi terutama kasus atau kejadian yang menjadi perhatian masyarakat dan media massa seperti kasus pencurian kayu illegal logging di Ketapang Kalbar, penjelasan tentang anggota Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran disiplin dan penyimpangan profesi.

Penanganan pencurian kayu illegal di Ketapang akan diproses secara professional dan proporsional dan kepada oknum Polisi yang terlibat akan dilakukan penyidikan apakah keterlibatannya telah melanggar disiplin atau profesi maupun tindak pidana, hasil dari penyidikan akan menentukan peran setiap personil Polri yang terlibat dan kasus ini akan diselesaikan secara tegas dan tuntas tanpa ada melindungi maupun menutupi tingkah laku personil yang berbuat kesalahan, ditegaskan oleh Kadiv Humas bahwa sampai pada saat ini keterlibatan Kapolda Kalbar dalam illegal logging belum terindikasi.

Kaitannya dengan adanya mutasi Kapolda Kalbar saat ini dinilai sebagai pejabat daerah tidak mengetahui tentang keadaan daerahnya, hal ini dalam upaya mendudukan permasalahan penilaian wartawan terhadap Kapolda Kalbar yang menilai telah terlibat, sehingga timbul opini terhadap Kapolda Kalbar, mutasi sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk memudahkan proses penyidikan terhadap kasus illegal logging.

Beberapa harapan dari Kadiv Humas Polri dalam kunjungan kerjanya ke KPI dapat lebih meningkatkan kerjasama, meningkatkan tukar menukar informasi untuk kepentingan dua institusi yang sebelumnya telah berjalan baik.

Beberapa informasi yang diberikan Ketua KPI kepada rombongan Divhumas Polri, dalam membentuk kemitraan dua institusi yang telah dituangkan dalam MoU perlu adanya tindak lanjut dilapangan baik

berupa sosialisasi UU Penyiaran dan UU Pers agar kedua UU tersebut dapat efektif secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, wartawan dan Pers, sehingga apabila ada pengaduan pelanggaran kedua UU tersebut dapat ditangani baik oleh KPI maupun Dewan Pers dan apabila ada unsur pidananya bisa dilanjutkan penyidikannya oleh Polri untuk penegakan hukumnya.

Ketua KPI memberikan beberapa saran tentang hubungan kedekatan dengan wartawan "jangan jauhi wartawan dan dekat betulpun tidak boleh" sehingga hubungan wartawan dan Polisi berjalan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing dalam upaya penyampaian informasi yang benar, akurat dan mendidik.

KPI menilai sampai saat ini masih banyak acara televisi yang kualitas penyiarannya masih kurang baik, hal ini masih banyaknya, pengaduan dari masyarakat, LSM maupun individu antara

Beberapa harapan dari Kadiv Humas Polri dalam kunjungan kerjanya ke KPI dapat lebih meningkatkan kerjasama, meningkatkan tukar menukar informasi untuk kepentingan dua institusi yang sebelumnya telah berjalan baik.



Studio TV swasta yang pertama dikunjungi oleh Kadiv Humas Polri adalah TV Indosiar, dimana hubungan baik antara Polri dan TV Indosiar telah terjalin sejak tahun 2002 dengan suatu MoU Polri dengan TV Indosiar dalam acara “Halo Polisi”

Diharapkan dengan adanya hubungan yang baik TV Indosiar telah membuka diri untuk Polri dalam upaya meningkatkan situasi yang kondusif melalui himbauan Kamtibmas, kupasan kasus yang menonjol serta hal-hal lain yang perlu diketahui oleh masyarakat, serta masyarakat dapat secara langsung mengetahui permasalahan dan informasi dari sumber pertama tentang Polisi.

Program Halo Polisi di TV Indosiar sebetulnya merupakan program yang tidak menguntungkan bagi TV Indosiar terutama pemasukan dari iklan sangat minim, namun pada ide awalnya adalah dalam upaya bertanggung jawab terhadap citra Polri, menyangkut citra Polri dan tidak menggurui masyarakat, membuka kasus yang menonjol yang sedang ditangani Polri, minta bantuan kepada Polri adalah gratis, banyak kerjasama yang baik antara Polri dan TV Indosiar.

TV Indosiar merupakan salah satu chanel TV Swasta yang telah bekerjasama secara baik dan berkelanjutan tanpa ada dukungan biaya dari anggaran APBN Polri, manfaat yang diambil oleh Polri adalah membangun citra Polri melalui media massa yang memiliki jaringan sampai pelosok Indonesia, peluang yang baik ini

belum ada kemitraan dengan media elektronik yang lain, yang masih perlu dikaji dalam kerjasama ini adalah masalah materi Halo Polisi dan jam tayang.

Namun dari seluruh kerjasama yang telah berjalan hampir tujuh tahun ini telah banyak manfaat khususnya untuk Polri dan masyarakat baik mengenai hukum, citra Polri, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kepercayaan masyarakat kepada Polri, hal-hal negatif yang ditujukan kepada institusi Polri telah dapat dicounter melalui acara Halo Polisi maupun running text serta acara khusus.

Dari kedua kunjungan kedua mitra Divhumas Polri bapak Kadiv Humas Polri membuka kesempatan 1 X 24 jam, untuk dihubungi atau dimintai informasi dan konfirmasi suatu berita demi membentuk citra positif Polri, informasi yang benar, akurat dan cepat dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa dan meningkatkan kesadaran hukum Bangsa Indonesia secara keseluruhan. ***

lain masalah pornoaksi, pelecehan terhadap seseorang, kekerasan serta acara yang kurang mendidik baik dari segi agama maupun etika.

Akhir kunjungan rombongan Divhumas Polri timbul beberapa harapan untuk memajukan kinerja kedua belah pihak dalam sosialisasi bersama tentang UU Pers dan Penyiaran, pertukaran informasi dalam bidang hukum terutama dalam hal penyidikan, dimana ada beberapa kasus dalam proses penyidikan belum dapat dipublikasikan untuk kepentingan penyidikan, serta mengharapkan pemilik perusahaan pers dapat menyeleksi mana berita untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan Bangsa.

Temu mitra dengan TV Indosiar.

Studio TV swasta yang pertama dikunjungi oleh Kadiv Humas Polri adalah TV Indosiar, dimana hubungan baik antara Polri dan TV Indosiar telah terjalin sejak tahun 2002 dengan suatu MoU Polri dengan TV Indosiar dalam acara “Halo Polisi”.



Tukar menukar cendera mata

PENGAMANAN PILKADA JABAR



Salah satu kampanye peserta Pilkada Jabar

Perhelatan Pilkada terbesar di Indonesia digelar pada Minggu, 13 April 2008, tercatat sebanyak 29 juta dari 40 juta penduduk Jabar akan menentukan kepala daerahnya.

Pilgub Jabar ini adalah Pilkada yang memiliki skala terbesar dan masyarakatnya cukup kosmopolitan serta heterogen, jadi jika ingin melihat Indonesia tinggal melihat Jabar saja, jika ingin mengacaukan Indonesia tinggal mengacaukan Jabar dan Jakarta, karena itu Jabar merupakan daerah yang memiliki potensi strategis sebagai daerah pemicu perpecahan secara nasional.

Pilkada Jabar menjadi perhatian tingkat Nasional dan cukup strategis mengingat wilayah ini sebagai penyangga ibu kota Negara, posisi tawar Jabar tentu diperhitungkan, baik dari sisi politik, sosial

dan ekonomi, setidaknya pemimpin di Provinsi Jabar memiliki daya tawar yang tinggi, dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah.

Potensi Jabar cukup memancing minat banyak pihak, dengan jumlah penduduk terbanyak, data terakhir BPS Jabar menunjukkan, jumlah penduduk Jabar saat ini mencapai 39.130.736 jiwa, lebih banyak dua juta jiwa dari Jatim dan tujuh juta jiwa dari Jateng, dengan jumlah penduduk yang banyak, jumlah pemilih pun paling banyak ada 29,3 juta jiwa warga yang memiliki hak pilih pada Pilgub Jabar.

Posisi Jabar yang strategis sebagai lumbung suara terbesar itulah, Jabar menjadi incaran partai politik besar, untuk merebut Gubernur Jabar, langsung atau tidak langsung kemenangan di Pilgub Jabar akan menjadi lebih signifikan menghadapi Pemilu Presiden tahun 2009.

Sikap Partai Politik yang menjadikan Pilgub Jabar sebagai landasan untuk menghadapi Pilpres tahun 2009, merupakan hal yang wajar dalam praktek, karena ada saling keterkaitan antara dinamika politik di daerah dan di pusat.

Polda Jabar terdapat 24 Polres, Polda Jabar akan menggerakkan dua pertiga kekuatan polisi mulai mengamankan pelaksanaan kampanye, pendistribusian alat peraga Pilkada, pemungutan suara, penghitungan hingga seluruh proses pemilihan berakhir.

Pengamanan Pilkada Jabar melibatkan kesatuan Intel, Reserse Kriminal Pengendalian Massa, Gegana Brimob, Polantas, Polair, dan Polisi Udara, satwa K-9, Bina Mitra, Telematika, Keslap, Propam dan Humas dilibatkan, serta sarana mobilitas.

Tahapan kampanye pemilihan Gubernur Jabar dan wakilnya dilaksanakan

mulai dari 27 Maret sampai 9 April 2008, kemudian dilanjutkan dengan masa tenang selama tiga hari, pada masa tenang itu, semua pasangan calon tidak diperkenankan lagi berkampanye dan harus melepas seluruh atribut kampanye. Pencoblosan dilakukan hari Minggu, 13 April 2008.

Tiga pasangan calon akan berlaga, Danny Setiawan - Iwan Tulanjana diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat (37 kursi di DPRD Jabar), Agum Gumelar - Nu'man Abdul Hakim diusung PPP, PDIP, PKB, PBB, PKBP, PDS (43 kursi di DPRD Jabar), sedangkan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf diusung PKS dan PAN (21 Kursi di DPRD Jabar).

Kampanye terakhir Pilkada Gubernur Jabar 2008 ditutup dengan debat kandidat yang digelar pada (9/4) di Hotel Horison Bandung, di forum itu para calon berkomitmen menggerakkan ekonomi guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Jabar.

Dalam debat yang berlangsung selama 1,5 jam para kandidat diwajibkan menjawab pertanyaan dari sejumlah panelis yang disiapkan KPU Jabar, para panelis itu adalah pakar ekonomi, hukum, pemerintahan dan politik dari berbagai perguruan tinggi di Jabar.

Debat publik Pilkada Jabar masih jauh dari sempurna, namun tetap penting bagi pendidikan politik dan referensi publik dalam memilih para calon, seluruh kandidat bersikap diplomatis, mereka tidak memberikan jawaban konkret dan spesifik untuk dijadikan ukuran serta berbicara dalam tataran abstrak.

Hari pertama masa tenang menjelang pencoblosan dimanfaatkan masing-masing kubu kandidat untuk melakukan protes, kubu Agum Gumelar - Nu'man Abdul Hakim (Aman) dan kubu Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (Hade) memprotes adanya ketidaksesuaian dalam daftar pemilih, sedangkan kubu Dani Setiawan



Debat kandidat calon Gubernur Jabar di Hotel Horizon

- Iwan Sulandjana (Da'I) memprotes pemasangan iklan salah satu kandidat di media massa pada masa tenang.

Rasa syukur atas kelancaran dan terjaganya suasana kondusif selama penyelenggaraan kampanye hingga masa tenang suasana sejuk dan damai karena kedewasaan kandidat calon dan barisan, kesiapan para aparat keamanan yang menjaga dan mengawasi jalannya kampanye serta kedewasaan masyarakat Jabar dalam berdemokrasi.

Selama masa kampanye tiga pasang kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tercatat melakukan pelanggaran, Panwas Pilgub Jabar mencatat pasangan Danny Setiawan - Iwan R. Sulandjono (Da'i) melakukan 40 pelanggaran, Agum Gumelar - Nu'man Abdul Hakim (Aman) 28 pelanggaran dan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (Hade) 41 pelanggaran.

Kebanyakan pelanggaran itu adalah pelanggaran administratif, hanya enam kasus bentuk pelanggaran pidana, namun tidak ada pidana yang dapat menyebabkan pasangan calon didiskualifikasi dalam Pilgub Jabar, selain pelanggaran diatas terdapat 65 pelanggaran yang tidak dapat diklasifikasikan, sehingga total jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan selama masa kampanye sebanyak 174 pelanggaran.

Terdapat 4.269 buah alat peraga yang telah ditertibkan oleh Panwas, karena dipasang sebelum masa kampanye atau dipasang di lahan yang bukan peruntukannya, daerah yang paling banyak ditemukan pelanggaran adalah kota Bogor sebanyak 75 kasus.

Pelanggaran pidana hanya terdapat di Kabupaten Karawang yang mencapai enam kasus, pelanggaran itu berupa keterlibatan pejabat Negara dalam kampanye pasangan calon tertentu, menanggapi kasus pelanggaran yang diumumkan Panwas Pilgub Jabar tiga kubu kandidat menyikapinya dengan tenang.

Pilkada Jabar juga diwarnai ledakan di kanoor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl. Ketapang Kabupaten Bandung, tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ledakan itu, tetapi dua dari tiga kendaraan bermotor yang di parkir di halaman kantor itu terbakar, kebakaran juga menghancurkan bagian samping kantor tersebut, tetapi tidak lama kemudian mampu dipadamkan.

Polisi berhasil menangkap tersangka berinisial DT, satu jam setelah peristiwa ledakan terjadi, DT ditangkap di kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tidak jauh dari lokasi kejadian.

Pelaku masih diperiksa secara tertutup di ruang reserse Kriminal Polri Bandung, Polisi belum bisa memastikan apakah perbuatan tersangka DT terkait dengan Pilkada Jabar atau tidak, karena pemeriksaan masih terus dilakukan, dari hasil penyelidikan sementara, ledakan yang terjadi di halaman PKS bukan diakibatkan bom jenis molotov.

Meski telah memasuki masa tenang persiapan Pilgub Jabar, atribut kampanye seperti spanduk, stiker dan baliho masih terpasang diseluruh pelosok Jabar, sedangkan Panwas Pilkada Jabar sudah meminta tim sukses dari setiap kandidat untuk membersihkan semua atribut.

Kamis siang (10/4) Panwas Pilkada Jabar Anton Minardi beserta Kalakhar Ops Praja Lodaya memantau keadaan masa tenang menggunakan helikopter jenis MR ke wilayah kota Bandung, Karawang dan Purwakarta.

Selain menjelang pemungutan suara Pilkada Jabar Selasa (14/4) juga telah menebar pesan Kamtibmas kepada masyarakat dalam secarik kertas yang disebarkan dari udara menggunakan helikopter, berisi mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Pilgub Jabar, beberapa daerah penyebaran pamflet di wilayah kabupaten di kota Bandung, Bogor, Sukabumi dan Sumedang, kegiatan yang menimpa helikopter setelah penyebaran pamflet melalui udara selesai, kaca di bagian belakang sebelah kanan diterpa angin, sebelum sempat ditutup, kaca terbawa angin dan akhirnya lepas keluar badan helikopter, kaca jendela ukuran 50cm x 75cm ditemukan diatap seng rumah Jl. Gang Slamet III no. 87 kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Bandung.

Panwaslu, Ketua KPU Jabar Setia Purnama dan Kapolda Jabar Brigjen Pol Drs. Susno Duadji, SH mengawasi Pilgub Jabar melalui pemantauan udara dengan menggunakan helikopter.

Masyarakat Jabar menentukan Gubernur dan Wakilnya dalam ajang Pilgub Jabar Minggu (13/4), melalui pencoblosan yang dilakukan di 63.005 Tempat Pemungutan Suara (TPS), suara dari

27.972.924 pemilih di Jabar akan menentukan pemimpinya untuk lima tahun mendatang.

Semua KPPS telah terbentuk begitu juga dengan TPS-TPS siap menggelar Pilgub Jabar, pelaksanaan pencoblosan dilakukan serempak di 26 Kabupaten / Kota di Jabar mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, tidak ada penundaan waktu pencoblosan di TPS manapun karena kendala teknis atau kendala lainnya.

Rapat Pleno KPU Jabar (22/4) memutuskan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada Jabar.

Dalam rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Jabar itu, aksi dari pasangan Agum Gumelar – Nu'man Abdul Hakim (Aman) menolak menanggapi berita acara pengesahan perhitungan suara manual KPUD.

Hasil rapat pleno menyebutkan pasangan Hade yang di usung PKS dan PAN meraih suara 7.782.647 (40,50 %), pasangan Aman yang didukung koalisi tujuh partai memperoleh suara 6.217.557 (34,55 %) dan pasangan Donny Setiawan – Iwan R. Sulanjana (Da'I) yang dicalonkan partai Golkar dan Demokrai meraup suara 4.490.901 (24,45 %), suara

syah yang masuk 17.996.105 dan tidak syah sebanyak 806.560 suara. Rapat pleno selama 4 jam di kantor KPU Jabar berlangsung alot dan beberapa kali terjadi interupsi dari saksi pasangan Aman. Dalam gedung KPU massa pendukung Aman yang ingin menerobos ke ruang rapat sempat baku hantam dengan aparat Kepolisian yang mengamankan rapat pleno, instruksi yang dilontarkan kubu Aman, diantaranya temuan sejumlah kotak suara di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bogor, yang segelnya telah terbuka serta dengan manipulasi pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT), oleh karena itu kubu Aman tidak bersedia menanggapi berita acara pengesahan perhitungan suara manual KPUD.

Siapa pun yang keluar sebagai "pemenang", jangan menganggapnya sebagai "kemenangan" mereka justru harus menerimanya sebagai sebuah beban, sekaligus tanggung jawab.

Mudah-mudahan siapa pun pemimpin propinsi Jabar yang terpilih adalah yang konsekuen melaksanakan janji-janjinya, sebab kelak rakyat akan mencatat dan menuntut janji kampanye.***



Para petugas Kepolisian sedang mengamankan jalannya kampanye